

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Wardiman Zain

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Wardiman.akuntansi2013@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the performance of the Bantaeng District Government. The population in this study is all of the financial statements of the Regional Government of Bantaeng Regency in 2012-2016 and the sample is the Budget Realization Report of Bantaeng Regency in 2012-2016 which was taken through purposive sampling. Data collection is carried out with library techniques and documentation techniques. The analysis technique used is financial ratio analysis, which is economical, efficiency, and effectiveness.

Based on the results of calculations that have been done shows that, the performance of the Bantaeng District Government during 2012-2016 is economical because it has an average economic ratio below 100% of 93.91%. In terms of the performance efficiency of the Bantaeng District Government during 2012-2016, it was efficient because it had an average efficiency ratio of 96.85%. And in terms of effectiveness, the average effectiveness ratio from 2012-2016 is 96.05% which shows the performance of the Bantaeng District Government during 2012-2016 is not effective.

Keywords: Performance Measurement, Economical, Efficiency, and Effectiveness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2016 dan sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2016 yang diambil melalui *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% yaitu 93,91%. Dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 96,85%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2012-2016 yaitu 96,05% yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

PENDAHULUAN

Setiap organisasi baik bisnis maupun publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai. Untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasarannya diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan.

Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Juli 2016 dalam Buku 1 ringkasan Eksekutif Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, di dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat total 16 pemerintah daerah termasuk Pemprov Sulsel yang mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yaitu Kabupaten

Bantaeng, Bone, Bulukumba, Gowa, Luwu, Luwu Timur Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Soppeng, Toraja Utara, dan Wajo.

Kabupaten Bantaeng untuk pertama kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian setelah 4 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhitung dari tahun 2011-2015. Namun hal ini belum tentu menunjukkan bahwa kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sudah sepenuhnya mengaplikasikan prinsip *value For Money*, yaitu Ekonomis, Efisiens, dan Efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Di dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan menyebutkan “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.” Sedangkan pengukuran kinerja menurut Bastian (2014:124) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian melalui pengukuran kinerja organisasi, dasar pengambilan keputusan yang masuk akal dapat dikembangkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi. Tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2010:14) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya,

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *Punishment*.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Value For Money

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu

organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Langkah-langkah Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:133) langkah-langkah pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Rasio Ekonomi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti ekonomis

Jika $x > 100\%$ berarti tidak ekonomis

Jika $x = 100\%$ berarti ekonomis seimbang

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama.
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *input*.
- c. Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama.
- d. Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti efisien

Jika $x > 100\%$ berarti tidak efisien

Jika $x = 100\%$ berarti efisiensi seimbang

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x > 100\%$ berarti efektif

Jika $x < 100\%$ berarti tidak efektif

Jika $x = 100\%$ berarti efektivitas seimbang

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2016. Sedangkan sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2016.

Teknik Analisis Data

dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara kuantitatif didasarkan pada prinsip *value for money*.

PEMBAHASAN

Analisis *Value For Money*

1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomi adalah rasio yang menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan DPPKAD dalam menjalankan tugas dikatakan ekonomis jika rasio yang dicapai

<100%. Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti ekonomis

Jika $x > 100\%$ berarti tidak ekonomis

Jika $x = 100\%$ berarti ekonomis seimbang

Tabal 1 Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2012-2016

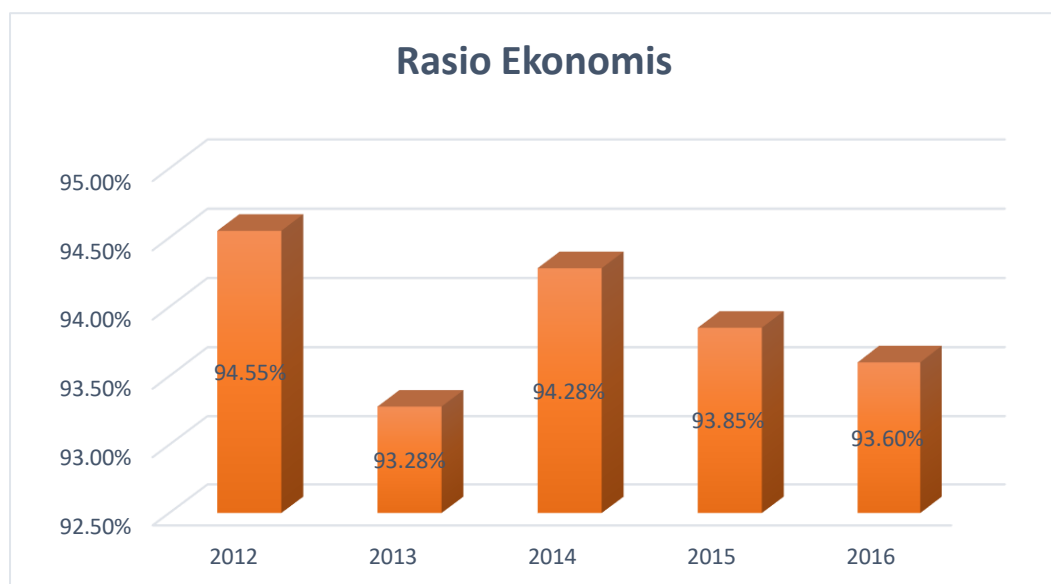
Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomis
2012	468.460.819.057	495.488.264.288	94,55%
2013	570.850.607.956	611.977.098.521	93,28%
2014	622.631.497.974	660.438.262.006	94,28%
2015	775.395.766.139	826.182.159.433	93,85%
2016	1.072.129.932.861	1.145.408.098.218	93,60%
Rata-Rata			93,91%

Sumber: BPKD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2016, diolah

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 berada pada range ekonomis dengan tingkat rasio 94,55%. Pada tahun 2013 tingkat ekonomis BPKD Kabupaten Bantaeng menurun sebanyak 1,27% menjadi 93,28%. Untuk tahun 2014 meningkat sebanyak 1%, namun kembali menurun pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 0,43% dan 0,25%. Secara keseluruhan rata-rata rasio ekonomis selama 2012-2016 sebanyak 93,91%.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan pengukuran rasio ekonomis berada pada range ekonomis. Dari data periode lima tahun, tidak ada periode yang berada diatas 100%.

Berarti setiap realisasi belanja selalu mencapai rencana anggaran belanja. Selain itu, dapat dilihat bagaimana rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama lima tahun tidak terlalu mengalami peningkatan/penurunan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2012-2016, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng berdasarkan rasio ekonomis mengalami peningkatan kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2016

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam merealisasikan pengeluaran dibandingkan dengan kemampuan dalam merealisasikan pendapatan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien jika rasio yang dicapai $<100\%$. Semakin rendah rasio efisiensi maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti efisien

Jika $x > 100\%$ berarti tidak efisien

Jika $x = 100\%$ berarti efisiensi seimbang

Berikut perhitungan rasio efisiensi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantaeng untuk tahun anggaran 2012-2016 yang diambil dari APBD dan LRA:

Tabel 2 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2012-2016

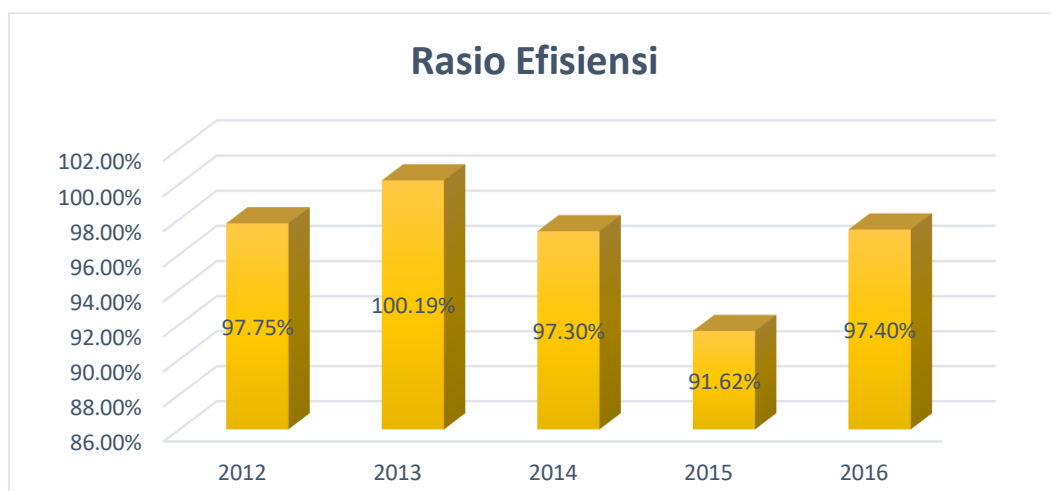
Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2012	468.460.819.057	479.362.667.998	97,75%
2013	570.850.607.956	556.110.764.908	100,19%
2014	622.631.497.974	624.129.081.005	97,30%
2015	775.395.766.139	802.829.889.278	91,62%
2016	1.072.129.932.861	1.039.883.197.753	97,40%
Rata-Rata			96,85%

Sumber: BPKD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2016, diolah

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 berada pada range efisien dengan rasio 97,75%. Pada tahun 2013 tingkat efisien BPKD Kabupaten Bantaeng meningkat sebanyak 2,44% menjadi 100,19%. Tahun 2014 menurun sebanyak 2,89% dan kembali menurun di tahun 2015 sebanyak 5,68%. Namun kembali meningkat pada tahun 2016 sebanyak 5,78%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama 2012-2016 sebanyak 96,85%.

Dari data diatas, dapat diketahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan pengukuran rasio efisien berada pada range efisien. Dari data periode lima tahun, hanya tahun 2013 yang tidak efisien karena berada pada range

diatas 100%. Berarti setiap realisasi belanja selalu dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan. Selain itu, dapat di lihat bagaimana rasio efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 2,44% dan tahun 2016 sebanyak 5,78%. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan rasio efisiensi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu masing-masing sebanyak dengan pada tahun 2014 dan 2015 yaitu masing-masing sebanyak 2,89% dan 5,68%. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2012-2016, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan rasio efisien mengalami peningkatan kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2016

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang

Sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan

Jika $x > 100\%$ berarti efektif

Jika $x < 100\%$ berarti tidak efektif

Jika $x = 100\%$ berarti efektivitas berimbang

Berikut perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk tahun anggaran 2012-2016 yang diambil dari APBD dan LRA:

Rasio Tabel 3 Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi
2012	479.362.667.998	485.547.888.468	98,73%
2013	556.110.764.908	590.148.790.377	94,23%
2014	624.129.081.005	653.522.123.079	95,50%
2015	802.829.889.278	818.631.057.071	98,07%
2016	1.039.883.197.753	1.109.991.068.542	93,68%
Rata-Rata			96,05%

Sumber: BPKD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2016, diolah

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.6, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 berada pada range tidak efektif dengan rasio 98,73%. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas BPKD Kabupaten Bantaeng menurun sebanyak 4,50% menjadi 94,23%. Tahun 2014 meningkat sebanyak 1,47% dan kembali

meningkat di tahun 2015 sebanyak 2,57%. Namun kembali menurun pada tahun 2016 sebanyak 4,39%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama 2012-2016 sebanyak 96,05%.

Dari data diatas, dapat diketahui pemerintah Kabupaten Bantaeng berdasarkan pengukuran rasio efektivitas berada pada range tidak efektif. Dari data periode lima tahun, tidak ada periode yang berada di atas 100%. Berarti setiap realisasi pendapatan tidak pernah mencapai rencana anggaran pendapatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa regulasi Peraturan Daerah dan pendukung-pendukungnya yang dirubah atau disesuaikan akibat diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum sepenuhnya berjalan efektif, karena masih dalam tahap sosialisasi. Selain itu permasalahan Pendapatan Asli Daerah juga terletak pada kemampuan sumber daya manusia atau aparat penagih pendapatan masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajibannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2012-2016, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng berdasarkan rasio efektivitas mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Grafik Perkembangan rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2016

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan prinsip *value for money* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata rasio ekonomis tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sebesar 93,91%.
Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori ekonomis. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berhasil menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga biaya yang terealisasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan.
2. Rata-rata rasio efisiensi tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah sebesar 96,85%.
Artinya pemerintah mampu mengelola keuangan daerah dengan menggunakan

sumber daya dengan tingkat tertentu untuk dapat mencapai output yang optimum.

3. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tidak efektif dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal ini ditunjukkan oleh perhitungan rasio efektivitas selama 5 tahun menghasilkan nilai dibawah 100%. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam menentukan target penerimaan tidak sukses, dibuktikan dengan pemerolehan realisasi pendapatan lebih rendah daripada pendapatan yang dianggarkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam pengelolaan keuangan daerah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan rasio ekonomis dan efisiensi yang telah memuaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng perlu meninjau penentuan target-target selanjutnya/yang akan datang agar pencapaian ini dapat bertahan atau bahkan lebih meningkat lagi.
2. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang masih kurang, menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk memperbaikinya. Pemerintah harus lebih meningkatkan sumber daya manusia, baik aparatur daerah maupun masyarakatnya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng harus mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat terutama terhadap bantuan-bantuan yang diberikan,

yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah periode analisis serta sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis analisis. Jenis analisis yang bisa digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Analisis Anggaran, Analisis Laporan Keuangan, *Balance Scorecard Method*, dan *Value for Money*. Pemakaian beberapa model analisis dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Buku I Ringkasan Eksekutif*, Jakarta September 2016
- Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta. BPFE.
- Halim & Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta. Rajawali Pres.

- Meri, A. (2013). *Analisis Value For Money dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada PDAM Tirta Musi Palembang*. Jurnal. STIE MDP.
- Naim, N. (2013). *Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar*. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Ulum, I. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.